

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2022**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Sumber Daya Manusia .....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama .....	1
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	4
2.2 Indikator Kinerja .....	6
2.3 Perjanjian Kinerja .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	15
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	15
3.3 Realisasi Anggaran .....	26
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	28
4.2 Rekomendasi .....	29
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja .....	
RKT / Lain2 yang dianggap perlu .....	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Dinas Perkim serta target kinerjanya Capaian Kinerja .....	4
Tabel 2.2 : Perencanaan Kinerja.....	6
Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja .....	7
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	14
Tabel 3.2.1 : Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022 .....	15
Tabel 3.2.2 : Perjanjian Kinerja tahun 2022.....	18
Tabel 3.2.3 : Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan.....	19
Tabel 3.2.4 : Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan.penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.....	20
Tabel 3.2.5 : Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	21
Tabel 3.2.6 : Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja.....	23
Tabel 3.3 : Realisasi Anggaran tahun 2022 .....	25

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan ... ..	x

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tegal, bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Perubahan 2019-2024.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2019 - 2024 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Slawi, 2023

Kepala

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman serta Pertanahan

**JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651015 198903 1 008

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### 1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Bahwa sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal , tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### 1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Dalam upaya melaksanakan misi pembangunan daerah yakni ***Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan***, beberapa aspek strategis yang menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan indicator kemiskinan perlu segera mendapatkan penanganan, baik penataan lingkungan, permukiman kumuh maupun rumah sehat;
2. Belum adanya regulasi pengelolaan PSU perumahan;
3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman untuk mendukung layanan infrstruktur dasar yang layak;
4. Belum optimalnya pembangunan perumahan dan permukiman yang didukung infrastruktur yang berkualitas dan mantap dalam bangunan Gedung dan perumahan.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Layanan infrastruktur dasar yang berkualitas belum merata	Terdapat masalah pertanahan dalam pelaksanaan pembangunan	Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan kurang optimal
		Sertifikasi lahan milik pemda masih rendah	Ketersediaan data aset lahan yang kurang baik
2.	Menurunnya kualitas lingkungan permukiman	Penyediaan permukiman yang layak khususnya korban bencana tidak merata	Adanya dampak bencana yang menyebabkan kerusakan rumah
		Masih banyak pembangunan dan pengembangan perumahan yang tidak memiliki izin	Lemahnya pengawasan dan pengendalian pengembangan perumahan
		Penanganan rumah tidak layak huni kurang optimal	Rendahnya partisipasi masyarakat golongan bawah untuk memiliki rumah yang layak
		Penanganan lingkungan permukiman kumuh belum optimal	Kurang terpantaunya pengembangan permukiman yang ada
			Kurangnya evaluasi atas pengembangan permukiman
			Kurangnya peran serta masyarakat

No .	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dalam penataan kawasan kumuh
		Tidak meratanya layanan PSU ( Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum )	Belum adanya perencanaan pengembangan PSU yang berkualitas



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka Panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang makavisi Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD adalah **“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia ”**.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi perangkat daerah harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi yang sesuai dengan RPJMD adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan sesuai dengan tugasnya membantu Bupati dalam urusan pemerintahan di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan. Ditinjau dari sisi tugas urusan bidang perumahan rakyat, Kawasan permukiman dan pertanahan, dalam pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan rakyat

dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-dua yaitu :

***Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.***

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode Renstra. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode Renstra. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah :

***"Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman yang Berwawasan Lingkungan".***

Sedangkan sasarannya adalah :

***"Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap".***

Tujuan dan Sasaran Dinas Perkim serta target kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman yang berwawasan lingkungan		Indeks infrastruktur wilayah mantap berwawasan lingkungan	Angka; kumulatif	76,93	79,41	84,80	84,80
	Meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap	Prosentase infrastruktur perumahan yang layak	Persen; tahunan	93,80	94,04	94,36	94,28
		Prosentase infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persen; tahunan	31,85	35,82	39,78	39,78
		Prosentase penatagunaan tanah yang digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	Persen; tahunan	84,10	100	100	100

## 2.2. Perencanaan Kinerja

Tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra dapat dilihat pada table berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator kinerja Program & Kegiatan	Satuan	Target	
	Meningkatkan infrastruktur permukiman yg layak	Pengembangan infrastruktur permukiman yang mantap	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	% Tahunan	100%
					Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin		
			2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Laju penurunan luas Kawasan kumuh yang telah ditetapkan	Hektar, Kumulatif	45,72%
			3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	%, Kumulatif	17,98%
			4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan	%, Kumulatif	84,50%
			5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Tahunan	100%
				Prosentase Aset Lahan milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	% Tahunan	78%	

			6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase implementasi redistribusi tanah	% Kumulatif	30%
			7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah yang tertata	%, Kumulatif	33,33%
			8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru	% Tahunan	100%

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program & Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatkan infrastruktur permukiman yg layak	Pengembangan infrastruktur permukiman yang mantap	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	% Tahunan	100%
				Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin		
			2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Laju penurunan luas Kawasan kumuh yang telah ditetapkan	Hektar, Kumulatif	45,72%
			3 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	%, Kumulatif	17,98%
			4 PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan	%, Kumulatif	84,50%
			5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Tahunan	100%
				Prosentase Aset Lahan milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	% Tahunan	78%

		6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase implementasi redistribusi tanah	% Kumulatif	30%
		7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah yang tertata	%, Kumulatif	33,33%

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERKIM TAHUN 2022**

No	Indikator kinerja Program & Kegiatan	Satuan, Sifat Data, Referensi	2022	
			Rp. (000)	Satuan
<b>1</b>	<b>Cakupan Rumah Layak Huni bagi masyarakat</b>	<b>% Tahunan</b>	<b>225.000</b>	<b>100%</b>
1	Jumlah koordinasi pelaksanaan Penyediaan dan Rehab Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Paket, Tahunan	25.000	1 pkt
1	Jumlah koordinasi pelaksanaan Penyediaan dan Rehab Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Paket, Tahunan	25.000	1 pkt
	Jumlah koordinasi pelaksanaan Penyediaan dan Rehab Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Paket, Tahunan	10.000	1 Pkt
	Jumlah sosialisasi pelaksanaan Penyediaan dan Rehab Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Paket, Tahunan	15.000	1 pkt
2	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%, Tahunan	100.000	100,00%
1	Jumlah rumah layak huni bagi warga di daerah rawan bencana	Unit Rumah, Tahunan	100.000	10 unit
	Jumlah rumah layak huni bagi warga di daerah rawan bencana	Unit Rumah, Tahunan	100.000	10 unit
3	Jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	Paket, Tahunan	100.000	1 pkt

	1	Jumlah koordinasi pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	Paket, Tahunan	100.000	1 pkt
		Jumlah koordinasi pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	Paket, Tahunan	50.000	1 pkt
		Jumlah koordinasi pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	Paket, Tahunan	50.000	1 pkt
<b>2</b>	<b>Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata</b>		<b>Hektar, Kumulatif</b>	<b>4.600.000</b>	<b>45,72%</b>
	1	Jumlah pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki izin		450.000	
	1	Jumlah KSM di permukiman kumuh yang terbentuk	Paket, Tahunan	300.000	1 paket
		Jumlah KSM di permukiman kumuh yang terbentuk		300.000	1 paket
	2	Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Paket, Tahunan	150.000	1 paket
	2	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata	Hektar, Kumulatif	4.150.000	45,72%
	1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Unit Rumah, Tahunan	1.800.000	150 unit
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Unit Rumah, Tahunan	1.800.000	150 unit
	2	Jumlah koordinasi pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Paket, Tahunan	75.000	1 pkt
		Jumlah koordinasi pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Paket, Tahunan	50.000	1 pkt
		Jumlah koordinasi pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Paket, Tahunan	25.000	1 pkt
	3	Luas permukiman kumuh yang tertata	Hektar, Tahunan	2.275.000	15 Ha
		Luas permukiman kumuh yang tertata	Hektar, Tahunan	2.275.000	15 hA

<b>3</b>	<b>Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni</b>	<b>%, Kumulatif</b>	<b>11.215.000</b>	<b>17,98%</b>
1	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	%, Kumulatif	11.215.000	17,98%
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Unit, Kumulatif	10.990.000	1100 unit
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Unit, Kumulatif	10.990.000	1100 unit
2	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Paket, Tahunan	225.000	1 pkt
	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Paket, Tahunan	150.000	1 pkt
	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Paket, Tahunan	75.000	1 pkt
<b>4</b>	<b>Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan</b>	<b>%, Kumulatif</b>	<b>850.000</b>	<b>84,50%</b>
1	Prosentase ketersediaan PSU perumahan	%, Kumulatif	850.000	84,50%
1	Prosentase ketersediaan PSU perumahan	% Kumulatif	400.000	84,5
	Terlaksananya Penataan Lingkungan	Paket, Tahunan	200.000	1 pkt
	Terlaksananya Penataan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Dukuhturi, Adiwerna, Talang, Tarub	Paket, Tahunan	200.000	1 pkt
	Terbangunnya Trotoar dan Drainase	Paket, Tahunan	-	-
	Terbangunnya Trotoar dan Drainase	Paket, Tahunan	-	-
2	Jumlah koordinasi penyelenggaraan PSU Perumahan	Paket, Tahunan	225.000	1 pkt
	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan PSU Perumahan	Paket, Tahunan	225.000	1 pkt



		3	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Paket, Tahunan	225.000	5 Perumahan
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	Paket, Tahunan	225.000	5 Perumahan
		<b>5</b>	<b>Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>% Tahunan</b>	<b>5.900.000</b>	<b>100%</b>
		1	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	% Tahunan	5.900.000	100%
		1	Terdokumentasinya Tanah yang akan direncanakan untuk Pembangunan dalam SK Penetapan Lokasi	% Tahunan	3.200.000	1
			Tersedianya bukti kepemilikan atas tanah /aset Pemda yang akan digunakan untuk kepentingan Pembangunan di Kab. Tegal	% Tahunan	2.700.800	100%
		<b>6</b>	<b>Persentase implementasi redistribusi tanah</b>	<b>% Kumulatif</b>	<b>150.000</b>	<b>30%</b>
		1	Teridentifikasinya Tanah - Tanah Milik Negara yang telah habis Ijin Hak Guna Usahanya	% Kumulatif	150.000	30%
		1	Tersedianya Bukti Kepemilikan Lahan yang menjadi Objek Redistribusi Tanah	% Kumulatif	150.000	30%
			Tersedianya Bukti Kepemilikan Lahan yang menjadi Objek Redistribusi Tanah		150.000	30%

	<b>7</b>	<b>Persentase Tanah yang tertata</b>	<b>%, Kumulatif</b>	<b>100.000</b>	<b>33,33%</b>
	1	Tersedianya dan Terpetakannya Bidang Tanah dan Nilai Tanah berdasarkan penggunaannya (TRISULA)	<b>%, Kumulatif</b>	100.000	33,33%
	1	Tersedianya dan Terpetakannya Bidang Tanah dan Nilai Tanah berdasarkan penggunaannya (TRISULA)	%, Kumulatif	100.000	33,33%
	<b>8</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Perkimtaru</b>		<b>9.693.634,76</b>	<b>100%</b>
	1	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		163.771,00	100%
		Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		163.771,00	100%
	2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.566.685,96	100%
		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		6.382.465,46	100%
		Terwujudnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		184.220,50	100%
	3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		167.896,00	100%
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		167.896,00	100%
	4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		840.644,00	100%
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		14.263,10	100%
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		104.555,90	100%
		Tersedianya Penyediaan peralatan rumah tangga		49.940,70	100%
		Tersedianya Penyediaan bahan logistik kantor		368.356,40	100%
		Tersedianya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		40.343,00	100%
		Tersedianya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		10.560,00	100%

			Terwujudnya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		252.624,90	100%
	5		Terwujudnya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		1.203.996,50	100%
			Tewujudnya pengadaan peralatan dan mesin lainnya		1.203.996,50	100%
	6		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		445.175,70	100%
			Tersedianya jasa surat menyurat		5.500,00	100%
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		378.179,70	100%
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		61.496,00	100%
	7		Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		1.146.109,60	100%
			Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		414.499,60	100%
			Terlaksananya Pemeliharaan Meubelar		11.605,00	100%
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan		65.485,00	100%
			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung		654.520,00	100%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skala Capaian Kinerja	Kategori Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

#### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja tahun 2022 Dinas Perkim dapat dilihat pada tabel 3.2.1. berikut :

**Target dan realisasi kinerja tahun 2022 :**

N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan infrastruktur permukiman yg layak/ Pengembangan infrastruktur permukiman yang mantap	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100%	100%	100	Sangat tinggi	-
		Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100%	100%	100	Sangat tinggi	-
		Laju penurunan luas Kawasan kumuh yang telah ditetapkan	45,72%	51,23%	112	Sangat tinggi	-
		Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	17,98%	19,85%	110	Sangat tinggi	-
		Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan	84,50%	84,50%	100	Sangat tinggi	-
		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100	Sangat tinggi	-
		Prosentase Aset Lahan milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	78%	99%	126	Sangat tinggi	-
		Persentase implementasi redistribusi tanah	30%	29%	96,66	Tinggi	-
		Persentase Tanah yang tertata	33,33%	32%	96	Tinggi	-

Capaian kinerja tujuan Meningkatkan infrastruktur permukiman yg layak dengan sasaran Pengembangan infrastruktur permukiman yang mantap didukung oleh 9 indikator kinerja, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Indikator kinerja Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten dengan capaian 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut menunjukkan Dinas Perkim telah melakukan rehab rumah layak huni bagi korban bencana sesuai dengan rencana. Lokasi rumah layak huni yang direhab terletak di Desa Dermasuci Kec. Pangkah. Jumlah rumah yang direhab sebanyak 13 unit sesuai rencana.
- Indikator kinerja Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin dengan capaian 100% dengan kategori **Sangat Tinggi** . Jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin sebanyak 16, dari keseluruhan pembangunan dan pengembangan perumahan.
- Indikator kinerja Laju penurunan luas Kawasan kumuh yang telah ditetapkan dengan capaian 112% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dari luasan 487,78 Ha telah terjadi penurunan luas Kawasan kumuh seluas 249,88 Ha. Hal tersebut dilakukan melalui kolaboratif anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa.
- Indikator kinerja Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni dengan capaian 110% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Penanganan RTLH di Kabupaten Tegal berasal dari berbagai sumber dana yakni APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Tegal.
- Indikator kinerja Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan dengan capaian 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Pada tahun 2022, paket-paket pekerjaan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dilaksanakan sesuai rencana.
- Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Pada tahun 2022 Dinas Perkim telah melaksanakan pengadaan tanah untuk perluasan Tempat Pembuangan Akhir Penujah. Dari 6 ( Enam ) bidang tanah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.
- Indikator kinerja Prosentase Aset Lahan milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat dengan capaian 126% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dari asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tegal sebanyak 3.153 bidang, yang sudah memiliki sertifikat sebanyak 3.151 bidang.

- Indikator kinerja Persentase implementasi redistribusi tanah dengan kategori **Tinggi**. Dari 8 tahapan redistribusi tanah yaitu :
  1. persiapan dan perencanaan ;
  2. penyuluhan ;
  3. inventarisasi dan identifikasi ;
  4. pengukuran dan pemetaan ;
  5. penelitian usulan penetapan obyek dan subyek redistribusi
  6. penetapan obyek dan subyek redistribusi
  7. penerbitan SK oleh ka. kantor
  8. terbit sertifikatdi tahun 2022 terlaksana 2 tahapan yaitu sosialisasi dan identifikasi tanah-tanah milik Pemerintah Kab. Tegal yang terletak di Desa Sumbarang, Danasari, Kedawung, Cikura, Kedungjelor dan Demangharjo.
- Indikator Kinerja Persentase Tanah yang tertata dengan capaian kinerja 50% dengan kategori **Sangat Rendah**. Program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah untuk mendukung terlaksananya program Trisula ATR/BPN Slawi. Dan pada tahun 2022, di ATR/BPN Slawi ternyata tidak melaksanakan program tersebut, sehingga kegiatan yang ada di Dinas Perkim tidak dilaksanakan maksimal.

### **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu**

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel 3.2.2. berikut :

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022					
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %			
1	Meningkatkan infrastruktur permukaan yg layak/ Pengembangan infrastruktur permukaan yang mantap	Cakupan akses layanan air minum	88	86,23	97,99	89	87,29	98,08						
		Cakupan akses layanan sanitasi ( Jamban )	90	88,70	98,56	93	93,64	100,69						
		Prosentase penurunan luas kawasan kumuh	60	32,47	54	45	48,39	107,53						
		Prosentase penanganan rumah tidak layak huni	15	12	80	18	17,24	95,78						
		Prosentase lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU	52,34	51,60	98,59	53,34	56,66	106,22						
		Rasio bangunan Gedung yang sesuai dengan syandar	68,67	66,67	97,09	70,34	70,34	100						
		Prosentase luas lahan yang bersertifikat	57,37	100	174	59,52	59,52	100						
		Prosentase ketaatan terhadap RTRW	86	87	101	87	65	74,7						
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten										100	100	100
		Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin										100	100	100
		Laju penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan										45,72	51,23	112
		Prosentase penanganan rumah tidak layak huni										17,98	19,85	110
		Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan										84,50	84,50	100
		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										100	100	100
		Prosentase Aset Lahan milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat										77,97	99	126
		Persentase implementasi redistribusi tanah										30	29	96,66
Persentase Tanah yang tertata							33,33	32	96					



**Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada table 3.2.3. berikut :**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan infrastruktur permukiman yg layak/ Pengembangan infrastruktur permukiman yang mantap	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	100	Sangat tinggi
		Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100	100	100	Sangat tinggi
		Laju penurunan luas Kawasan kumuh yang telah ditetapkan	51,23	55,97	91,53	Tinggi
		Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	19,85	23,6	84,11	Tinggi
		Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan	84,50	85,90	98,37	Sangat tinggi
		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	100	100	Sangat tinggi
		Prosentase Aset Lahan milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	99	97	102	Sangat tinggi
		Prosentase implementasi redistribusi tanah	29	100	96	Sangat tinggi
		Persentase Tanah yang tertata	32	100	96	Sangat tinggi

- Capaian realisasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten tahun 2022 sebesar 100 sedangkan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100, sehingga capaian tahun 2022 sudah 100% dari target akhir RPJMD.
- Capaian realisasi Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin tahun 2022 sebesar 100 sedangkan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100, sehingga capaian tahun 2022 sudah 100% dari target akhir RPJMD.
- Capaian realisasi Laju penurunan luas Kawasan kumuh yang telah ditetapkan tahun 2022 sebesar 51,23%, sedangkan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 55,97%, sehingga capaian tahun ini adalah sebesar 91,53% dari target akhir RPJMD. Diharapkan tahun 2023 dan 2024 dapat memenuhi target capaian akhir RPJMD.
- Capaian realisasi Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni tahun 2022 sebesar 19,85%, sedangkan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 23,6%, sehingga capaian tahun 2022 adalah 84,11% dari target akhir RPJMD. Diharapkan tahun 2023 dan 2024 dapat memenuhi target capaian akhir RPJMD.

- Capaian realisasi Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan tahun 2022 sebesar 84,50, sedangkan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 85,90, sehingga capaian tahun 2022 adalah 98,37% dari target akhir RPJMD.
- Capaian realisasi Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota tahun 2022 sebesar 100, sedangkan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100, sehingga telah memenuhi target.
- Capaian realisasi Prosentase Aset Lahan milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat tahun 2022 sebesar 99, sedangkan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 97, sehingga capaian tahun 2022 telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 102%.
- Capaian realisasi Prosentase implementasi redistribusi tanah tahun 2022 sebesar 29 sedangkan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100, sehingga hanya terpenuhi 2%. Di tahun 2023 dan 2024 diharapkan dapat terpenuhi 8 ( Delapan ) tahap redistribusi tanah sehingga dapat mencapai target akhir RPJMD 100%.
- Capaian realisasi Presentase tanah yang tertata tahun 2022 sebesar 32 sedangkan target akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100, sehingga baru memenuhi 32% dari target akhir. Tahun 2023 dan 2024 akan lebih aktif berkoordinasi dengan ATR/BPN untuk pencapaian kinerja sehingga memenuhi target akhir RPJMD.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada table 3.2.4 berikut ;**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan infrastruktur permukiman yg layak/ Pengembangan infrastruktur permukiman yang mantap	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	100	Tersedianya anggaran untuk rehab rumah korban bencana dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Desa Dermasuci dan masyarakat korban bencana mendukung tercapainya target kinerja	-
		Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100	100	100	Koordinasi dengan para pengembang perumahan/ asosiasi pengembang dan perangkat daerah terkait mendukung capaian kinerja melebihi target.	-
		Laju penurunan luas Kawasan	45,72	51,23	112	Tercapainya target kinerja dilakukan melalui kolaboratif	-

		kumuh yang telah ditetapkan				anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa	
		Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	17,98	19,85	110	Penanganan RTLH di Kabupaten Tegal berasal dari berbagai sumber dana yakni APBN, APBD Prov Jawa Tengah dan APBD Kab Tegal	-
		Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan	84,50	84,50	100	Identifikasi paket-paket pekerjaan yang dibutuhkan untuk pemenuhan PSU perumahan	-
		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	100	100	Koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan masyarakat pemilik lahan	-
		Prosentase Aset Lahan milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	77,97	99	126	Koordinasi dengan perangkat daerah terkait yaitu DPUPR, Dinas Dikbud dan ATR/BPN.	-
		Prosentase implementasi redistribusi tanah	30	29	96,6	Dari 8 tahapan redistribusi tanah hanya dapat dilaksanakan 4 tahap.	Penambahan personal pada bidang yang menangani
		Persentase Tanah yang tertata	33,33	32	96	Program/kegiatan/sub kegiatan yang ada untuk mendukung program Trisula yang ada di ATR/BPN. Ternyata pada tahun 2022 ATR/BPN tidak melaksanakan program tersebut.	Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan ATR/BPN terkait program Trisula

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada table 3.2.5. ;**

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		T ar g et	Realisasi	% C a p	Anggar an	Realisasi (Rp)	% C a p	

				ai a n	(Rp)		ai a n	
1	Meningkatkan infrastruktur permukiman yg layak/ Pengembangan infrastruktur permukiman yang mantap							
	<i>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten</i>	100	100	100	125.000.000	125.000.000	100	Sangat tinggi
	<i>Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin</i>	100	100	100	150.000.000	139.671.625	93,11	Sangat tinggi
	<i>Laju penurunan luas Kawasan kumuh yang telah ditetapkan</i>	45,72	51,23	112	5.584.534.500	5.208.243.350	93,26	Sangat tinggi
	<i>Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni</i>	17,98	19,85	110	2.700.000.000	2.699.970.000	99,99	Sangat tinggi
	<i>Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan</i>	84,50	84,50	100	8.284.180.000	7.130.142.654	86,07	Tinggi
	<i>Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	100	100	100	3.200.000.000	2.384.726.029	74,22	Sedang
	<i>Prosentase Aset Lahan milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat</i>	77,97	99	126	2.700.800.000	1.443.627.910	53,45	Rendah
	<i>Prosentase implementasi redistribusi tanah</i>	30	29	96,66	150.000.000	104.068.243	69,38	Sedang
	<i>Persentase Tanah yang tertata</i>	33,33	32	96	100.000.000	16.055.000	16,06	Sedang

**3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada table 3.2.6 berikut ;**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang	
1	Meningkatkan infrastruktur perumahan permukiman yang layak/ Pengembangan infrastruktur permukiman yang mantap	Prosentase infrastruktur perumahan yang layak Prosentase infrastruktur perumahan yang layak	103,80	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	Menunjang	
					Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100	Menunjang	
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kab/Kot	Jumlah koordinasi pelaksanaan penyediaan dan rehab rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota		Menunjang	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kab/kota		Menunjang	
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin		Menunjang	
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan	84,50	Menunjang	
			Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	Prsentase ketersediaan PSU perumahan		Menunjang		
			Prosentase infrastruktur kawasan permukiman yang layak	35,59	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Laju penurunan luas Kawasan kumuh yang telah ditetapkan	51,23	Menunjang
			Prosentase infrastruktur kawasan permukiman		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman		Menunjang
					Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertata		Menunjang
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni		19,85	Menunjang		

		yang layak		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni		Menunjang	
		Prosentase penatagunaan tanah yang digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	73,28	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100	Menunjang	
						Prosentase Aset Lahan milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	126	Menunjang
					Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota		Menunjang
					PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Prosentase implementasi redistribusi tanah	96,6	Menunjang
					Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Teridentifikasinya tanah-tanah milik negara yang telah habis ijin hak guna usahanya		
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah yang tertata	96	menunjang
			Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/Kota	Tersedianyan dan terpetakannya bidang tanah berdasarkan penggunaannya ( Trisula )				

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perkim sesuai dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada table 3.3. berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi ( Rp )	% Capaian
1	2	3	11	12
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>10.247.394.000</b>	<b>9.368.690.174</b>	
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>143.771.000</b>	<b>114.375.341</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.771.000	114.375.341	79,55
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.654.582.500</b>	<b>6.127.020.907</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.470.362.000	5.984.672.907	92,49
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	184.220.500	142.348.000	77,27
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>167.896.000</b>	<b>121.286.800</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	167.896.000	121.286.800	72,24
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>865.734.000</b>	<b>843.664.180</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.263.100	14.048.400	98,49
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.555.900	103.297.500	98,80
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.940.700	48.211.300	96,54
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	368.356.400	354.344.500	96,20
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.343.000	39.371.800	97,59
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.650.000	15.380.000	98,27
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.624.900	269.010.680	98,67
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>878.264.500</b>	<b>849.090.500</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	878.264.500	849.090.500	96,68
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>500.324.700</b>	<b>361.999.086</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.400.000	97,78
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.179.700	250.261.396	66,18
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.645.000	107.337.690	91,24
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.036.821.300</b>	<b>951.253.360</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	414.499.600	334.463.360	80,69
	Pemeliharaan mebel	11.605.000	9.702.500	83,61

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.458.400	63.279.000	96,67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	545.258.300	543.808.500	99,73
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>350.000.000</b>	<b>326.866.642</b>	
8	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>75.000.000</b>	<b>62.195.017</b>	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/ SukarelawanTanggap Bencana	75.000.000	62.195.017	82,93
9	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>125.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	125.000.000	125.000.000	100,00
10	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>150.000.000</b>	<b>139.671.625</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	150.000.000	139.671.625	93,11
	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>4.850.880.000</b>	<b>4.832.142.396</b>	
11	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>39.880.000</b>	<b>39.230.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	39.880.000	39.230.000	98,37
12	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>111.000.000</b>	<b>104.298.750</b>	
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	111.000.000	104.298.750	93,96
13	<b>Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>4.700.000.000</b>	<b>4.688.613.646</b>	
	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	400.000.000	388.643.646	97,16
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.600.000.000	1.600.000.000	100,00
	Pembangunan Rumah Baru Tidak Layak Huni	2.700.000.000	2.699.970.000	100,00
	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>3.433.654.500</b>	<b>3.076.070.954</b>	
14	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.433.654.500</b>	<b>3.076.070.954</b>	
	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.433.654.500	3.076.070.954	89,59
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA dan UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>8.284.180.000</b>	<b>7.130.142.654</b>	
15	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>8.284.180.000</b>	<b>7.130.142.654</b>	
	Penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi/hunian	6.534.180.000	5.607.052.100	85,81



	koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum/perumahan	1.750.000.000	1.523.090.554	87,03
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>5.900.800.000</b>	<b>3.828.353.939</b>	
16	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.900.800.000	3.828.353.939	
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000.000	2.384.726.029	74,52
	koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	2.700.800.000	1.443.627.910	53,45
	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>150.000.000</b>	<b>104.068.243</b>	
17	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	104.068.243	
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	50.000.000	34.083.283	68,17
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100.000.000	69.984.960	69,98
	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>100.000.000</b>	<b>16.055.000</b>	
18	Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	100.000.000	16.055.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100.000.000	16.055.000	16,06
<b>JUMLAH</b>		<b>33.316.908.500</b>	<b>28.682.390.002</b>	<b>86,09</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Tahun 2022 Dinas Perkim mengampu 3 ( Tiga ) urusan, 8 ( Delapan ) program, 18 ( Delapan belas ) kegiatan dan 37 ( Tiga puluh tujuh ) sub kegiatan. Pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp. 33.316.908.500,- ( Tiga puluh tiga milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah ). Dari 9 ( Sembilan ) indikator kinerja yang ada, 7 ( Tujuh ) indikator dapat memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan 2 ( Dua ) indikator masih dibawah target. Dari indikator kinerja yang terpenuhi, dikaitkan dengan pagu anggaran yang disediakan, masih terdapat efisiensi anggaran pada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan. Sedangkan pada indikator kinerja yang belum memenuhi target, masih tersisa anggaran tetapi karena sumber daya manusia yang belum mencukupi dan kurangnya koordinasi dengan Lembaga terkait.

Namun secara umum, kinerja Dinas Perkim selama tahun 2022 dalam memenuhi indokator tujuan dan sasaran dapat dilihat pada table berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Target Akhir Renstra
				2022	2022	
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman yang berwawasan lingkungan		Indeks infrastruktur wilayah mantap berwawasan lingkungan	Angka; kumulatif	76,93	76,97	84,80
	Meningkatkannya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap	Prosentase infrastruktur perumahan yang layak	Persen; tahunan	93,80	93,80	94,28
		Prosentase infrastruktur kawasan permukiman yang layak	Persen; tahunan	31,85	35,59	39,78
		Prosentase penatagunaan tanah yang digunakan untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	Persen; tahunan	84,10	76,50	99

## B. REKOMENDASI

Target akhir Renstra yaitu tahun 2024, berarti masih ada 2 tahun ke depan yaitu tahun 2023 dan 2024. Dari pencapaian tahun 2022, Dinas Perkim akan mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja agar dapat tercapai target yang telah ditetapkan di akhir tahun Renstra. Dari indikator yang sudah memenuhi target, akan dilakukan sebagai berikut :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana memerlukan kesiapan personil untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah desa dan BPBD Kab. Tegal. Koordinasi dalam bentuk konsultasi, rapat, bahkan turun langsung ke lokasi bencana. Jika diperlukan anggaran yang berasal dari provinsi atau pusat, maka Dinas Perkim akan mengupayakan untuk berkoordinasi lebih intensif lagi.
- Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin, memerlukan pendekatan dan koordinasi dengan para pengembang yang akan mengajukan ijin atas perumahan yang akan dibangun. Regulasi yang ada akan diperbaiki atau disempurnakan untuk menunjang pencapaian kinerja.
- Indikator kinerja Laju penurunan luas Kawasan kumuh yang telah ditetapkan akan dilakukan kolaborasi penggalan anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa.
- Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni, di tahun 2022 akan lebih ditingkatkan dengan menggali anggaran dari berbagai sumber dana yakni APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Tegal.
- Persentase ketersediaan prosentase PSU perumahan, akan mengidentifikasi perumahan-perumahan yang sudah menyediakan kelengkapan PSU. Kemudian dari anggaran yang tersedia digunakan untuk membangun/menyediakan PSU yang belum tersedia.
- Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, indikator ini bergantung ada tidaknya aktifitas pengadaan tanah yang digunakan untuk keperluan Pemerintah Daerah. Jika ada perangkat daerah yang membutuhkan tanah/lahan maka akan dilaksanakan oleh Dinas Perkim. Sehingga memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah yang memerlukan.
- Prosentase Aset Lahan milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat sangat membutuhkan kesiapan personal dalam mendata asset lahan milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat, kemudian dilakukan pengukuran dan pendaftaran ke ATR/BPN untuk diterbitkan sertifikatnya.

Untuk pencapaian indikator kinerja yang belum memenuhi target akan dilakukan sebagai berikut :

- Persentase implementasi redistribusi tanah terdiri dari 8 tahapan redistribusi tanah yaitu :
    1. persiapan dan perencanaan ;
    2. penyuluhan ;
    3. inventarisasi dan identifikasi ;
    4. pengukuran dan pemetaan ;
    5. penelitian usulan penetapan obyek dan subyek redistribusi
    6. penetapan obyek dan subyek redistribusi
    7. penerbitan SK oleh ka. kantor
    8. terbit sertifikat
- di tahun 2022 terlaksana 2 tahapan yaitu sosialisasi dan identifikasi tanah-tanah milik Pemerintah Kab. Tegal yang terletak di Desa Sumbarang, Danasari, Kedawung, Cikura, Kedungjelor dan Demangharjo. Untuk tahun ke depan akan mengajukan anggaran yang dapat memenuhi 8 tahapan tersebut dan kesiapan personal untuk melaksanakan tahapan tersebut.
- Persentase Tanah yang tertata , Program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah untuk mendukung terlaksananya program Trisula ATR/BPN Slawi. Dan pada tahun 2022, di ATR/BPN Slawi ternyata tidak melaksanakan program tersebut, sehingga kegiatan yang ada di Dinas Perkim tidak dilaksanakan maksimal. Akan dilakukan koordinasi lebih efektif dengan ATR/BPN terkait program-program yang ada di ATR/BPN.

Slawi, 2023  
Kepala  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman serta Pertanahan

**JAENAL DASMIN, BE, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651015 198903 1 008

# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKIM

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA  
PERTANAHAN

